

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap arti judul "Bentuk Pemberdayaan Narapidana oleh Rumah Tahanan Negara Pemalang Jawa Tengah" dan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dalam memahami maksud dan tujuan, maka penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap beberapa istilah dan sekaligus memberikan batasannya. Adapun istilah yang perlu dipertegas dalam judul ini adalah:

1. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan yang berada dalam batin seseorang (kekuatan berfikir). Sedangkan berdaya berarti kekuatan atau bertenaga. Jadi pemberdayaan adalah usaha-usaha dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat kegiatan emansipasi terencana, dan terarah juga dikehendaki serta berkelanjutan.¹

Dari definisi di atas, maka penulis mendefinisikan maksud pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan petugas Rutan Pemalang Jawa Tengah pada Narapidana sehingga mereka mampu berbuat banyak untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri, terutama di bidang

¹ Ade Ma' ruf dan Zulfan Heri, *Muhamadiyah dan Pemberdayaan Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), hal. 40

keagamaan dan ketrampilan melalui sarana-sarana yang telah ada di dalam Rutan.

2. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman atau hilang kemerdekaan.² Yaitu orang yang telah melanggar hukum dan diadili oleh hukum. Orang terpidana tersebut telah diambil kemerdekaannya, atau kebebasannya oleh negara dan suatu saat nanti akan dikembalikan kepada masyarakat setelah menjalani hukuman.³

Narapidana yang dimaksud di dalam penelitian adalah orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan dia telah melanggar hukum atau telah melakukan tindak pidana oleh pihak yang berwenang dan sebagai sanksinya dia dimasukkan ke dalam penjara sebagai orang-orang hukuman dengan status narapidana. Sedangkan narapidana yang menjadi objek penelitian di sini adalah khususnya mereka yang beragama Islam terutama pada soal pemberdayaan di bidang keagamaan, karena memang mayoritas penghuninya semua beragama Islam.

3. Rumah Tahanan Negara⁴

Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang penanganan untuk penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung

² UU RI No.12 1995, *Tentang Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan 1996), hal.3

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pranya Paramita, 1985), hal.96

⁴ Untuk selanjutnya, Istilah Rumah Tahanan Penulis akan menyingkat menjadi "Rutan" sebagaimana yang telah lazim di dengar di lingkungan Departemen Kehakiman.

kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman.⁵ Jadi yang dimaksud dengan Rumah Tahanan Negara dalam skripsi ini adalah tempat untuk menampung dan mengurus orang-orang yang melanggar hukum dengan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah kegiatan di dalam bidang keagamaan dan ketrampilan.

Berdasarkan penegasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul "Bentuk Pemberdayaan Narapidana oleh Rumah Tahanan Negara Pemalang Jawa Tengah" adalah penelitian tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh petugas Rutan Pemalang untuk merubah dan mendidik kondisi para Narapidana yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas dan keahlian hidup sebagai manusia yang bermoral serta mempunyai kesempatan berkembang dengan baik secara sosial, agama, pendidikan maupun ekonomi.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam kehidupannya adalah sebagai objek maupun subjek pembangunan, dan pembangunan di Indonesia merupakan kegiatan yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas di dalam kehidupan manusia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya usaha di segala bidang pembangunan yang salah satunya adalah bidang keagamaan. Jadi

⁵ R. I Keputusan Menteri Kehakiman No. 04 Pr 07.03. 1987, Tentang Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Rutan.

pembangunan di Indonesia merupakan usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia Indonesia baik material maupun spiritual, dunia dan akhirat.⁶

Islam sebagai rahmat bagi alam semesta sudah seyogyanya apabila kegiatan-kegiatannya memperhatikan lingkungan dimana Ia berkembang, dan karena itu sinkronisasi dakwah dengan pembangunan nasional adalah suatu keharusan agar pembangunan nasional berhasil dengan baik. Demikian pula pembangunan itu dapat memberikan tempat untuk agama agar menjadi motivator bagi para pemeluknya untuk dapat berperan pada pembangunan.⁷

Di dalam kehidupan, kejahatan merupakan masalah yang tidak akan habis-habisnya, sehingga akan kelihatan masalah atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu banyak pihak yang dirugikan baik kerugian yang bersifat moral maupun material. Tindak kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat proses pembangunan.

Pada dasarnya, Islam adalah agama pemberdayaan.⁸ Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas bangsa, masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan umat manusia dari negara lain. Fakta ini menunjukkan adanya upaya-upaya

⁶ Nasruddin Harahap, *Dakwah Pembangunan* (Yogyakarta: DPD Golongan Karya Tingkat I Propinsi Istimewa Yogyakarta, 1992), hal.19

⁷ *Ibid.*, hal 20

⁸ Makna tersirat dalam, Q.S. Al-Maaun (107) dalam R.H.A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan dan Penerjemahan dan Pentafsiran Al-Qur'an, 1971), hal. 1108

pemberdayaan yang sistematis dan terus menerus yang nantinya melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi atau berkualitas.⁹

Manusia di dalam kehidupannya, ada yang dapat menerima dan melaksanakan norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi tidak sedikit pula individu yang tidak dapat menyesuaikan diri dan mentaati norma-norma tersebut. Akibatnya, mereka harus berhadapan dengan penegak hukum. Perilaku penyimpangan itu antara lain, seperti penyalahgunaan obat bius dan narkoba, pelacuran, tawuran, tindak kekerasan dan lain sebagainya, masalah sosial tersebut bersumber kepada beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, biologis, psikologis dan kebudayaan.¹⁰

Untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan menuju kesejahteraan, pemerintah terus melakukan peningkatan di segala bidang, termasuk dalam hal penanganan masyarakat yang dinilai belum bisa bermasyarakat atau mengganggu ketertiban masyarakat (melanggar hukum untuk dibina dan disejahterakan kembali melalui Rumah Tahanan Negara, seperti halnya Rutan yang berada di Pemalang Jawa Tengah. Berdirinya Rutan ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam

⁹ Nanih Machendra Wati dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Idiologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 41

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Rajawali Press, 2004), hal. 335

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

Pemerintahan dalam hal ini berupaya sebaik mungkin mengupayakan berbagai program pemberdayaan bagi para narapidana dengan indikator meningkatkan kualitas narapidana secara keseluruhan. Program pemberdayaan ini mendapatkan perhatian yang penuh, sehingga menuntut adanya suatu perubahan dari status narapidana ke arah yang lebih baik setelah keluar dari Rutan.

Dengan program pemberdayaan yang ada, mereka diharapkan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam suatu pembangunan menuju Indonesia sejahtera. Program pemberdayaan tersebut meliputi beberapa bidang antara lain: bidang keagamaan yaitu: sholat lima waktu, ceramah pengajian, peringatan hari-hari besar Islam dan sholat juma't. Bidang pendidikan yaitu, pendidikan baca Al-Qur'an dan Bidang ketrampilan yaitu kegiatannya: kursus menjahit atau pertukangan kayu dan olah raga. Program-program tersebut diberikan kepada narapidana dan dijadikan sebagai sarana pembinaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik, berguna serta dapat memberikan kemandirian dalam menghadapi hidup, meski tentu saja banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan tersebut.¹²

Dari pemaparan di atas betapa kompleksnya kehidupan manusia. Dimana pada satu sisi manusia harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan

¹¹ Lihat pasal 1 Undang-Undang No.12 tentang lembaga pemasyarakatan. Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Pidana* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1959), hal 6

¹² Observasi Pra Riset, Kamis, 4 Januari 2005

hidupnya, tetapi di sisi lain manusia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya baik kepada masyarakat sekitarnya lebih-lebih kepada Tuhan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya Rutan Pemalang dalam mengimplementasikan program pemberdayaan pada Narapidana, sehingga benar-benar dapat meningkatkan kualitas moral dan ketrampilan diri yang diharapkan setelah keluar dari Rutan Pemalang kembali hidup normal dan berguna bagi masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan adanya bentuk pemberdayaan narapidana di Rutan Pemalang?
2. Bagaimana bentuk pemberdayaan petugas Rutan Pemalang terhadap narapidana di dalam bidang Agama Islam dan Ketrampilan?
3. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan petugas Rutan dalam proses pemberdayaan bagi para narapidana?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pemberdayaan narapidana yang dilakukan oleh petugas Rutan Pemalang.

2. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh petugas Rutan Pemalang terhadap narapidana melalui program kegiatan di bidang keagamaan dan Bidang ketrampilan
3. Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat proses pemberdayaan di dalam bidang keagamaan dan ketrampilan yang dihadapi oleh narapidana maupun petugas Rutan Pemalang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis memberikan pengetahuan bahwa Rutan Pemalang memberikan program pemberdayaan bagi narapidana, sehingga mereka dapat meminimalisir kejahatan. Dan di harapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembinaan terhadap narapidana setelah mereka keluar dari Rutan.
2. Secara praktis Sebagai masukan bagi Rutan Pemalang dalam rangka meningkatkan kualitas pemberdayaan di dalam bidang keagamaan dan ketrampilan terhadap narapidana. Dan Sebagai bahan masukan bagi petugas Rutan dalam menyampaikan materi di bidang keagamaan dan ketrampilan.
3. Kontribusi bagi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam fakultas Dakwah adalah untuk mengetahui strategi dan praktek di lapangan bagaimana proses pemberdayaan terhadap komunitas narapidana dilakukan.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Mc Ardle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan kemampuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara komulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang di miliki seseorang, maka semakin baik partisipasinya.

Ada dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan,¹³ yakni *pertama* pemberdayaan menekankan pada proses atau pengalihan kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar suatu individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini lebih dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

Kedua pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai pilihan hidupnya melalui proses dialog. Kecenderungan kedua ini

¹³ A. M. W. Prarnarka dan Vidyandika Meoljarto, *Pemberdayaan dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), hal. 56

dalam proses pengembangan idenya mengandung muatan pikiran mengenai kemampuan individu untuk mengontrol lingkungannya.

Kesadaran dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri, serta menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.¹⁴ Seseorang menganalisis sendiri masalah mereka. Mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru.

Kesadaran merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang. Analisis realitas harus dilakukan oleh orang yang dapat memutuskan sendiri apa kebutuhan dan pengalaman yang penting baginya dan bukan diputuskan pada orang lain. Di sinilah manusia ditempatkan dalam proses sejarahnya masing-masing sebagai subyek yang menentukan pilihannya sendiri.¹⁵

Menurut Amrullah Ahmad menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah dalam bidang sosial ekonomi dan lingkungan dalam persepektif Islam. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan model empiris pengembangan perilaku dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.¹⁶

¹⁴ Esron Aritonang Dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001), hal. 51

¹⁵ M. Hanif Dhakiri dan Poule Freire, *Islam dan Pembebasan* (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 73

¹⁶ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei., *Op. Cit*, hal. 43

b. Model Pemberdayaan

Bookman dan Morgen sebagaimana dikutip oleh Harry Hitmat mengemukakan bahwa pemberdayaan yang sedang populer mengacu pada usaha menumbuhkan keinginan seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas, serta memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang merasa berdaya.¹⁷

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keinginan untuk mengubah keadaan yang datang dari dalam diri tersebut dapat muncul jika seseorang merasa dalam situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui tekanan. Pentingnya dorongan yang berasal dari dalam melebihi seseorang bagi perbaikan diri dan lingkungan.

Adi Sasono sebagaimana dikutip M. Khoirun Najib merumuskan tiga model pemberdayaan masyarakat dalam visi perubahan perilaku yakni: model pengembangan lokal, perencanaan dan aksi sosial.¹⁸

1) Model Pengembangan Lokal

Model pengembangan lokal mensyaratkan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara optimal bila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua spektrum

¹⁷ Harry Hitmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2001), hal. 34

¹⁸ Muhammad Khoirun Najib, "Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi dan Budaya" *dalam Populis*, Edisi No. III, hal. 4

masyarakat tingkat local, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan.

Tujuan yang dicapai bukan hanya tujuan akhir tetapi proses untuk mencapai tujuan sehingga, tujuan utama yakni mengembangkan masyarakat dapat berfungsi secara intensive. Tema-tema pokok dalam pengembangan lokal mencakup penggunaan prosedur demokrasi dan kerja sama atas dasar kesukarelaan, keswadayaan dan pengembangan kemandirian masyarakat.

Menurut Radi A. Gani dimensi kemandirian dalam model pengembangan lokal mencakup tiga aspek.¹⁹ *Pertama community oriented*, yaitu pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan nyata yang disadari komunitas setempat. *Kedua Community based* yaitu pemberdayaan yang didasarkan pada sumber daya yang ada pada masyarakat setempat yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya kelembagaan masyarakat, dan nilai-nilai yang mendukungnya. *Ketiga community managed* yaitu pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat setempat sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemetikan hasil kegiatan, yang perlahan-lahan mengentaskan masyarakat setempat dari obyek ke posisi sebagai subyek pemberdayaan.

¹⁹ Radi A. Gany, *Menyongsong Abad Baru dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal* (Yogyakarta: LKiS 2000), hal. 166

2) Model Perencanaan Sosial

Model ini menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, dan partisipasi warga masyarakat sangat beragam tergantung pada masalah itu sendiri dan kelompok orang yang ada di dalamnya.²⁰

Sasaran atau tujuan utama yang ingin dicapai dalam model pendekatan ini adalah menciptakan, menyusun dan memberikan bantuan baik berupa materi maupun pelayanan yang berbentuk jasa dengan tujuan menciptakan kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam memecahkan permasalahan melalui kegiatan program yang terencana, terarah dan terkendali.

3) Model Aksi Sosial

Model ini menekankan berapa pentingnya penanganan kelompok masyarakat yang tidak beruntung secara kelompok, terarah, sistematis. Tujuannya mengadakan perubahan mendasar melalui pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya atau dalam hal perbuatan keputusan kelompok dan mengubah dasar kebijakan. Langkah yang ditempuh yaitu dengan memotivasi masyarakat untuk bersifat kritis dan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan.

c. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan manusia diarahkan pada persoalan bagaimana manusia atau masyarakat yang ada dapat

²⁰ *Ibid.*, hal 168

mengembangkan, memotivasi dirinya untuk mengarah optimalisasi kemampuan sehingga dapat mencapai keinginan atau cita-cita lembaga atau individu dengan efisien dan efektif.²¹

Jadi tugas utama pemberdayaan manusia yaitu memelihara dengan sebaik mungkin keberadaan sumber daya manusia yang meliputi faktor kemampuan dan kemauan.²² Menurut Soekidjo Noto Atmojo pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yakni kualitas fisik atau kualitas nonfisik. Kualitas fisik menyangkut sumber daya manusia yang dikembangkan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan aspek kualitas nonfisik menyangkut mutu sumber daya manusia dan kemampuannya, baik kecerdasan maupun mentalitas sumber daya manusia itu sendiri. Aspek ini dapat dilakukan melalui program pendidikan atau pelatihan. Dengan demikian secara makro pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia, agar dapat mengolah dan mengelola sumber daya manusia, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pengembangan itu sendiri.²³ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pemberdayaan membutuhkan aspek

²¹ Husen Umar, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* (Jakarta: Gramedia, 1998), hal.38

²² Paduan Serikat Bina Desa, *Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1999), hal. 51

²³ Hary Hitmat, *Op. Cit.*, hal. 43

yang menentukan adanya kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas potensi dan daya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu:

1) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai proses kedewasaan sosial yang menuju pada tataran ideal. Makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan pemeliharaan dan pengembangan potensi SDM.²⁴

Jadi pendidikan dalam konteks pengembangan SDM bukanlah merupakan pengalihan atau mentransfer pengetahuan, melainkan membantu narapidana untuk belajar agar mampu berdaya untuk mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin.²⁵

Pendidikan pengembangan SDM berisi tentang perilaku-prilaku pemahaman yang dilakukan melalui dialog sehingga para warga masyarakat belajar menjadi bermakna dan dihargai. Sedangkan keagamaan untuk membina masyarakat yang bertujuan untuk kesadaran masyarakat. Sedangkan pelatihan atau ketrampilan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat supaya menjadi manusia yang berkualitas dalam

²⁴ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hal. 16

²⁵ Dick Hartoko, *Memanusiakkan Manusia Muda, Tinjauan Pendidikan* (Yogyakarta: Humaniora, 1995), hal.36

berfikir atau bekerja keras. Pelatihan tersebut mencakup antara lain:

- a) Pelatihan-pelatihan untuk pelaksanaan program kegiatan.
- b) Pelatihan untuk menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada.

2) Partisipasi Sumber Daya Manusia

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.²⁶ Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila dia menemukan dirinya dengan kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Implikasi dari pengertian itu adanya kelompok menjadi penting dan perlu dalam upaya mengembangkan partisipasi. Setiap individu atau kelompok adalah perilaku yang berhak menetapkan segala sesuatu berdasarkan pada tata nilai, tradisi, kemampuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Proses pencapaiannya kesepakatan itu dilakukan dengan cara musyawarah.

Musyawarah menjadi media strategis dalam mengembangkan partisipasi. Proses itu dirancang dan dilakukan sendiri oleh para masyarakat yang sekaligus sebagai wahana latihan berpartisipasi. Melalui musyawarah tersebut beberapa hasil dapat diperoleh antara lain:

²⁶ Paduan, *Penguatan Manajemen LSM* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2000), hal.29

- a) Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat.
- b) Meningkatkan kemampuan diri dalam berinteraksi.
- c) Mengembangkan kepercayaan diri.
- d) Menjalin kebersamaan dan solidaritas.
- e) Menambah wawasan.
- f) Memecahkan masalah dengan berbagai alternatif.
- g) Menghasilkan program kegiatan kerja.

2. Tinjauan tentang Narapidana

a. Pengertian tentang Narapidana

Seseorang yang dijatuhi putusan pidana penjara dan bertempat tinggal di lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana. Istilah narapidana terdiri dari beberapa unsur yaitu:

- a) Warga Negara yang telah melakukan tindak pidana.
- b) Diputuskan oleh hakim tentang hukumannya.
- c) Diterima oleh yang bersangkutan.

Jadi yang dimaksud narapidana adalah seseorang warga Negara yang telah divonis oleh hakim karena melanggar hukum yang telah ditetapkan kemudian ditempatkan di Rutan.²⁷

Berangkat dari definisi di atas maka jelaslah bahwa ciri-ciri

Narapidana adalah:

- 1) Ditempatkan di Rutan.

²⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dan Sistem Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 180

- 2) Hilang kemerdekaan bergerak.
- 3) Kehilangan kehendak dan menentukan kehendak.
- 4) Kehilangan untuk mendapatkan pelayanan seperti masyarakat bebas.

b. Macam-macam Kejahatan Narapidana

Penyimpangan perilaku melanggar norma sosial menyebabkan seseorang akan melakukan tindak kejahatan dengan berbagai bentuk modus operandinya.

Kejahatan adalah bentuk penyimpangan tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat social dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.²⁸ Secara sosiologis, kejahatan berarti semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politik dan social psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang terucap dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang).²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan adalah perilaku manusia yang jahat, imoril dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan reaksi kemarahan masyarakat

²⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1998), hal.137

²⁹ *Ibid.*, hal.138

serta banyak merugikan umum. Kalau di rinci bentuk kejahatan di atas ada 14 macam bentuk kejahatan yaitu:

- 1) Pembunuhan, penyembelihan, pencekikan sampai mati
- 2) Perampokan, pemerasan, penyerangan
- 3) Pelanggaran seks dan pemerkosaan
- 4) Maling atau pencuri
- 5) Mengancam dan pemerasan
- 6) Pemalsuan dan penggelapan
- 7) Korupsi atau penyuapan
- 8) Pelanggaran ekonomi
- 9) Penggunaan senjata api dan perdagangan secara gelap
- 10) Pelanggaran sumpah
- 11) Bigami yaitu kawin rangkap dalam suatu saat
- 12) Kejahatan-kejahatan politik
- 13) Penculikan
- 14) Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.³⁰

Orang yang melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor intern pribadinya, faktor kondisi bahkan sering dari faktor lingkungan.

³⁰ *Ibid.*, hal. 151

3. Pemberdayaan dalam Masyarakat

a. Bentuk-bentuk Pemberdayaan dalam Masyarakat

Salah satu bentuk pemberdayaan manusia adalah melalui pendampingan. Dengan kata lain pendampingan adalah suatu upaya untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia.³¹ Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pendampingan dikenal dengan pendidikan yaitu dengan teori dan praktek. Teori pendidikan yaitu pengetahuan tentang makna dan bagaimana pendidikan seyogyanya pendidikan atau pendampingan itu dilaksanakan. Sedangkan dalam prakteknya adalah pelaksanaan pendampingan secara konkret. Pendampingan juga diartikan sebagai aktivitas pengembangan SDM yang dirancang untuk meningkatkan kualitas masyarakat diluar pekerjaan yang sedang dihadapi untuk mencari jalan keluar tentang permasalahan yang ada. Dalam udahnya untuk meningkatkan potensi diperlukan adanya latihan untuk meningkatkan kinerja masyarakat dalam menghadapi pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi.³²

Menurut instruksi Presiden No. 15/1974, bahwa latihan adalah bagian pendampingan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat

³¹ Imam Barnadib, *Dasar-dasar Kependidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal. 8

³² *Ibid.*, hal. 3

dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.³³

b. Langkah-langkah dan Pendekatan Pemberdayaan

Langkah-langkah yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Intervestasi Fakta.³⁴

Intervestasi fakta di sini meliputi beberapa hal:

- a. Fakta material, yaitu usaha untuk mengungkapkan seluruh kondisi fisik yang ada di sekitar tempat pengembangan atau pemberdayaan SDM dalam hal ini meliputi: penggunaan fasilitas gedung atau ruangan, sarana informasi, sarana operasional atau dengan kata lain pemanfaatan segala sarana dan prasarana yang ada.
- b. Fakta sosial, ekonomi dan hukum, yaitu usaha untuk mengungkapkan seluruh kondisi sosial meliputi: keadaan sumber daya manusia yang ada, latar belakang sosial pendidikan, keadaan ekonomi, usaha produksi dan kelembagaan dalam masyarakat.

2) Identifikasi Masalah.

Dalam langkah kedua ini, akan diidentifikasi masalah yang menyangkut upaya SDM di dalam pemberdayaan.

³³ *Ibid.*, hal. 4

³⁴ Waryono Abdul Ghofur, "Pengembangan SDM Tilikan Al-Qur'an" dalam *Populis*, Edisi November 2001, hal. 22

3) Kegiatan Pemecahan Masalah

Dalam langkah yang ketiga ini untuk menguasai dituntut untuk menguasai segala permasalahan yang ada dan mampu memecahkan masalah-masalah tersebut dengan tepat, dan menjadikan SDM sebagai sumber daya yang efektif.

Sedangkan dalam setiap pendekatan yang dilakukan oleh setiap institusi Pemberdayaan ini, menurut Tadjuddin Noer Efendi terhadap pemberdayaan sumberdaya manusia adalah: *Pertama, pendekatan mutu modal manusia (human capital)*, menekankan bahwa manusia adalah faktor produksi yang amat penting selain tanah, teknologi dan modal. Oleh karena itu bila produktifitas akan ditingkatkan maka selain modal dan menambah input untuk meningkatkan mutu tanah, juga kualitas manusia perlu ditingkatkan.³⁵ Upaya peningkatan kualitas manusia perlu adanya investasi pada bidang keagamaan dan ketrampilan. *Kedua, yaitu pendekatan terpadu* dengan unsur-unsur perencanaan SDM yang berhubungan dengan parameter-parameter dasar proses pertumbuhan.³⁶ Perencanaan SDM mencakup perencanaan jumlah modal manusia, pemberdayaan dan pemanfaatannya. Pemberdayaan manusia terpadu di sini adalah pendekatan antar disiplin yang melibatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. *Ketiga, pendekatan*

³⁵ Tadjuddin Noer Efendi, *SDM, Peluang Kerja, dan Kemiskinan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hal. 6

³⁶ *Ibid.*, hal. 7

pemecahan masalah, yaitu para masyarakat dituntut untuk mengetahui permasalahan yang ada dan mampu memecahkan masalah tersebut secara baik dan tepat.

Tindakan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir manusia, pengetahuan dan ketrampilan di dalam memilih kemampuan yang dibutuhkannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan melalui proses kegiatan yang terarah. Di samping itu, keterbukaan dalam penyebaran informasi amat membantu dalam proses pemecahan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³⁷

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan oleh petugas Rutan Pemalang, baik secara fisik maupun secara non fisik.

³⁷ Moekijat, *Metode Riset dalam Pelatihan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 26

2. Menentukan Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi untuk memperoleh keterangan, sedangkan menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber dari penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini orang yang menjadi sumber penelitian adalah individu atau aktor lapangan yang merupakan kunci (key person) di Rutan Pemalang dalam hal ini adalah para petugas Rutan dan narapidana Rutan Pemalang. Adapun objek penelitian adalah pokok bahasan dari penelitian yang diteliti oleh penulis. Objek dalam penelitian ini adalah kajian tentang latar belakang, tujuan, faktor pendukung, penghambat dan bentuk pemberdayaan narapidana yang dilakukan oleh petugas Rutan dalam bidang keagamaan dan keterampilan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode:

a. Wawancara atau Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.³⁹ Interview ini dilakukan melalui proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Dalam metode interview penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin artinya, informan diberi kebebasan

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), hal. 90

³⁹ Soleman B. Taneka, *Struktur dan Proses Suatu Pengantar Sosial Pembangunan* (Jakarta: Rajawali.1990), hal. 110

untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Rutan Pemalang beserta program kegiatannya. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan program pemberdayaan di Rutan bagi narapidana.

b. Metode Observasi

Dalam tahap pengumpulan data, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan observasi atau pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan datang, melihat, mengamati secara seksama keadaan Rutan Pemalang disaat proses pelaksanaan pemberdayaan narapidana berlangsung. Selain itu peneliti juga mengamati karismatik dari orang-orang yang diteliti baik petugas Rutan Pemalang, maupun narapidana. Waktu dari pengamatan tidak tentu, dari berjam-jam atau seharian. Hal ini dilakukan untuk melihat realitas sosial yang tidak ditangkap melalui teknik wawancara. Secara umum observasi berarti pengamatan, sedangkan secara khusus observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati, melihat, mendengar langsung dalam rangka memahami, secara bukti terhadap fenomena sosial dengan cara mencatat fenomena tersebut sehingga dapat diperoleh data mengenai berbagai aspek dan tingkah laku masyarakat.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln mengapa observasi dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penelitian kualitatif, antara lain: *pertama*, observasi didasarkan pengamatan langsung. *Kedua*, memungkinkan peneliti melihat dan mengamati

sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. *Ketiga*, observasi memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung dari data. *Keempat*, observasi digunakan untuk mengecek kepercayaan data dengan jalan memanfaatkan pengamatan. *Kelima*, memungkinkan peneliti memahami situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks. *Keenam*, teknik komunikasi tidak memungkinkan untuk digunakan maka pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat.⁴⁰ Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung dan memungkinkan melihat, mengamati kemudian mencatat perilaku serta kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya yaitu mengenai proses pelaksanaan kegiatan yang ada di Rutan Pematang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang tertulis yang dalam pelaksanaannya yaitu untuk menyelidiki tanda-tanda tertulis seperti: buku, dokumen, majalah, catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.⁴¹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang: Gambaran umum Rutan Pematang, yang diperoleh dari arsip daerah, dan literatur-literatur dan sumber data tertulis dan juga mengenai proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang ada di Rutan.

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 125-126

⁴¹ *Ibid.*, hal. 202

5. Teknik Analisa Data

Menganalisa data dapat diartikan dengan mengelompokkan, mengurutkan, meringkas data untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian. Adapun analisa data yang digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah setelah data terkumpul baik yang diperoleh melalui interview, observasi maupun dokumentasi kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisa dengan argumentasi yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat secara jelas tentang pelaksanaan pemberdayaan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Rutan terhadap narapidana di Rutan tersebut.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan data-data yang telah penulis sajikan dalam laporan skripsi ini, maka disini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. latar belakang pemberdayaan narapidana di Rutan Pemalang adalah berangkat dari asumsi dasar bahwa narapidana adalah orang termarginalkan, terpinggirkan dan selalu mendapat perhatian yang kurang dari masyarakat. Sedangkan tujuan dari pemberdayaan narapidana adalah untuk meningkatkan potensi dan kemampuan narapidana dalam bidang ketrampilan dan keagamaan. Dan berangkat dari asumsi masyarakat yang selalu memandang rendah narapidana di sini para Perugas Rutan ingin membuktikan bahwa narapidana juga adalah orang yang mempunyai keahlian yang sama dimiliki oleh masyarakat kebanyakan.
2. Pemberdayaan narapidana pada bidang keagamaan dan ketrampilan yang dilakukan oleh petugas Rutan Pemalang adalah melalui pelaksanaan yang diterapkan dalam kegiatan ceramah pengajian, pelaksanaan sholat lima waktu, pelaksanaan sholat jum'at, pengajaran membaca Al-Qur'an, dan peringatan hari-hari besar Islam. Bidang ketrampilan meliputi pertukangan kayu dan jahit menjahit sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik berkat kerja sama dengan pihak luar. Juga dapat memberikan solusi bagi narapidana tentang masalah yang sedang dihadapi. Materi-materi yang digunakan dalam pelaksanaan keagamaan dan adalah materi tentang

ibadah, keimanan, ahlak dan di bidang ketrampilan meliputi cara-cara menggunakan alat-alat jahit dan pertukangan kayu dan tehnik pembuatannya. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah metode ceramah, tanya jawab, peraga. Adapun metode yang paling sering digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah ceramah dan tanya jawab.

3. Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan pemberdayaan keagamaan dan ketrampilan di Rutan Pemalang adalah dari faktor pendamping yaitu kerjasama yang baik dari petugas Rutan, sarana yaitu tersedianya sarana yang disediakan di dalam Rutan Pemalang, serta objek itu sendiri yaitu partisipasi narapidana yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan. Sedangkan dari faktor penghambatnya adalah juga dari faktor pendamping kurangnya tenaga pengajar, sarana dan prasarana yang masih kurang, dan pendanaannya.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan kemudian menguraikan tentang pelaksanaan pemberdayaan narapidana yang di dampingi oleh para petugas Rutan Pemalang, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai saran dan alternatif pikiran untuk meningkatkan kualitas kegiatan yaitu:

1. Untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan hendaknya metode yang digunakan tetap dipertahankan dan dikembangkan agar narapidana lebih bermotivasi.

2. Hendaknya pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilaksanakan lebih ditingkatkan dan penambahan tenaga pengajar perlu ditimbangkan mengingat jumlah para narapidana cukup banyak.
3. Dalam pelaksanaan pemberdayaan hendaknya dilaksanakan diruangan tersendiri dan terpisah antara narapidana yang mempunyai tingkatan kemampuan berbeda agar pelaksanaan pemberdayaan lebih efektif dan efisien.
4. Hendaknya di dalam pelaksanaan pemberdayaan dibidang keagamaan dan ketrampilan dibuat pedoman atau kurikulum tentang materi yang disampaikan hal ini untuk mengantisipasi adanya pengulangan-pengulangan materi yang disampaikan, kalau ini berlanjut akan menimbulkan kebosanan terhadap narapidana.

C. Kata Penutup

Diakhir penulisan ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan terutama mengenai penggunaan metode dan perumusan isi, oleh karenanya penyusun sangat berharap kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini baik langsung maupun tidak, penulis haturkan terima kasih semoga amal kebajikan itu dibalas oleh Allah SWT.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1987
- Ade Ma'ruf dan Heri Zulfan, *Muhamadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985
- Ahmadi, *Islam Sebagai Ilmu Paradigma Ilmu Pendidikan*, Bandung: Aditya Arya, 2001
- Bambang Purnomo, *Pelaksana Pidana Penjara dan Sistem Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Dik Hartono, *Memanusiakkan Manusia Muda*, Tinjauan Pendidikan, Yogyakarta: Humaniora, 1995
- Esron Aritonang, dkk, *Pendampingan Komonitas Pedesaan*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001
- Harry Hitmat, *Starategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2001
- Husen Umar, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarata: Gramedia, 1998
- Imam Barnadib, *Dasar-dasar Kependidikan Memahami Makna dan Perspektif Beberapa Teori Kependidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1998
- Keputusan Menteri Kehakiman No. 04 Pr 07.03. *tentang Tenaga Kerja Organisasi dan Tata Kerja Rutan*, 1987
- Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitataf*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- M. Hanif Dhakiri dan Paulo Feire, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999
- Moekijat, *Metode Riset dalam Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994

Meoljarto Vidyandika dan A. M. W. Pramarka, *Pemberdayaan dalam Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996

Nanih Mawendrawati dan Agus Ahmad Syafei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Idiologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001

Nasrudin Harahap, *Dakwah Pembangunan*, Yogyakarta: DPD Golongan Karya Tingkat I Propinsi Istemewa Yogyakarta, 1991

Populis, Edisi November 2001

Populis, Edisi No. III, 2003

Paduan, *Penguatan Manajemen LSM*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2000

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

R. H. A. Seonarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan dan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1971

Soerjono Seokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Soleman B. Taneka, *Stuktur dan Proses suatu Pengantar Sosial Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1990

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA